

DAFTAR RUJUKAN

BUKU :

- Abdurrahman, Muslan. (2009). *Sosiologi dan Metode penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Ajat Sudrajat. (2008). *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Dirjen Imigrasi.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, H. Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Asep, Kurnia. (2011). *Imigran Ilegal*. Jakarta: IOM-OIM.
- Bambang, Sunggono. (2009). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhanuddin. (2019). *Hukum Keimigrasian di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.
- Firmansyah, M. (2013). *Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang- Undang No. 12 Tahun 2006*. Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Galang Asmara. (2020). *Hukum Keimigrasian*, NTB: Pustaka Bangsa.
- Gatot Supramono, (2012), *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamidi Jazim, Charles Christian. (2015). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ibnu, Ismoyo. (2010). *Tinjauan Pengawasan Orang Asing dan Permasalahanya*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Ishaq el Ropingi. (2017). *Public Relations Teori dan Praktik*. Malang: Intrans Publishing.
- Jazim Hamidi & Charles Christian. (2016). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- John Sarodja. (2008). *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian dalam Perspektif Lalu Lintas Antar Negara*. Jakarta: Dirjen Imigrasi.
- Kasianus Daud. (2008). *Perbatasan Wilayah Negara RI dalam Perspektif Lalu Lintas Antar Negara*. Jakarta: Dirjen Imigrasi.
- M. Iman Santoso. (2017). *Perspektif imigrasi dalam Migrasi Manusia*. Bandung:
- Midran Dylan. (2020). *Pengawasan Keimigrasian*. Depok: Pohon Cahaya.
Pustaka Reka Cipta.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saidin, Oke (2016). *Menemukan dan Menjadi Hukum Indonesia: Refleksi Pemikiran Prof. Mahadi*.
- Satjipto, Raharjo. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sihar, Sihombing. (2013). *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Supramono, G. (2012). *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Wahyudin Ukun. (2004). *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta: PT. Adi Kencana Aji.
- Waluyo. Bambang. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

SKRIPSI/THESIS/DISERTASI :

Abimanasa, M. S. (2019). *Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Dokumen Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Surakarta* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).

Muharmonth, M., & Arief, A. M. R. (2017). *Prosedur Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Diberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang* (Doctoral dissertation, Riau University).

Novarera, H., Rasito, R., & Maryani, M. (2018). *Pelanggaran Keimigrasian Yang Di Lakukan Oleh Warga Negara Asing (WNA) (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Jambi)* (Doctoral Dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

Puspitasari, V. G. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).

Rahmi, T. Y. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap WNA Pemegang KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) Menurut UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).

Rinanda, D. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Izin Imigrasi (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia, Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara).

Sebayang, P. (2021). *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Orang Asing yang Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan* (Doctoral dissertation, Universitas Borneo Tarakan).

Sitorus, M. S. (2022). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Wna Yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia (Studi Putusan No 129/Pid. Sus/2020/PN Btm)* (Skripsi, Universitas HKBP Nommensen).

ARTIKEL DALAM JURNAL ILMIAH :

- Ayuningtyas, D. W. (2021). *Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Keimigrasian. Journal of Administration and International Development*, 1(1), 1-13.
- Citrawan, Harison., & Nadilla, Sabrina. (2019). *Model Kontrol Keimigrasian dalam Mencegah Tindak Bebas Visa Kunjungan Singkat oleh Warga Negara Asing. Jurnal Kolaboratif Sains*, 1(1), 1137-1147.
- Daliman, M., & Arifin, R. (2020). *Cooperation Initiatives Between The Directorate General Of Immigration And The Australian Government On Airports In Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 63–76. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.549>
- Damayanti, A., Naray, P. N., & Karyoprawiro, B. L. (2023). *Peran Keimigrasian Dalam Pencegahan Terorisme Di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Kantor Imigrasi Tahuna. Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 13(2), 240-259.
- Dewansyah, B. (2015). *Perkembangan Politik Hukum dan Kebutuhan Hukum Keimigrasian Indonesia: Menjawab Sebagian, Melupakan Selebihnya. Hasanuddin Law Review*, 1(2), 140. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.88>
- Dwirokhmeiti, E. L., & Setyawan, E. (2022) *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Keimigrasian Oleh Mahasiswa Asing Di Indonesia. E-JURNAL THE SPIRIT OF LAW*, 2.
- Hadi, A., & Syahputra, Y. (2020). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal. 4(1)*, 76–87.
- Hasan, A., (2015). *Pengawasan dan penindakan Keimigrasian bagi orang asing Yang melebihi batas waktu izin Tinggal di Indonesia. Lex et Societatis*, 3(1).
- Laela, S., & Rakasiwi, G. (2021). *Tanggung Jawab Hukum Pengelola Hunian Terhadap Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Wilayah Hunian Apartemen. In IBLAM Law Review* 1(3).

- Laluraa, S. (2020). *Peraturan Hukum Tentang Dokumen Perjalanan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi. Lex Et Societatis*, 8(4).
- Naibaho, G. V. (2022). *Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Bagi Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Indonesia Tanpa Izin (Studi Putusan No. 2465/Pid. Sus/2020/PN Mdn)*.
- Naim, A., Renggong, R., & Salam Siku, A. (2021). *Analisis Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Overstay Oleh Warga Negara Asing Di Makassar*. In *J. Paradigma Administrasi Negara* 3(2).
- Nugroho, Chahyo O. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 231-247.
- Prayulianda, H. A., & Antikowati, A. (2019). *Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan*. *Lentera Hukum*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v6i1.8428>
- Ridwansyah, M. (2016). *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 278-298.
- Sanusi, A. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2).
- Sanusi, A. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian*. *Jurnal Fiat Justisia*, 10(2), 387-411.
- Setiawati, D. (2015). *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)*. *Jurnal Pandecta*, 10(1), 14-29.
- Surbakti, C. E., Pratama, D. A., & Asgar, F. (2021). *Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian*

Overstay. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), 1264.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1732>

Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. In Seminar Hukum Nasional 4(1), 25-49.

INTERNET :

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, *Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Singaraja*. Tersedia di (<https://imigrasisingaraja.kemendikhum.go.id/wilayah-kerja/>). Diakses 2 Agustus 2022.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, *Sejarah Kantor Imigrasi Singaraja*. Tersedia di (<https://imigrasisingaraja.kemendikhum.go.id/sejarah-kantor-imigrasi-singaraja/>). Diakses 8 Juli 2022.

Kantor Imigrasi Batam, *Permenkumham No 6 Tahun 2019 tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi*. Tersedia di (<https://kanibatam.kemendikhum.go.id/category/peraturan-menteri/permenkumham-no-6-tahun-2019-tentang-penilaian-kriteria-klasifikasi-kantor-imigrasi>). Diakses 17 Desember 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian. Lembaran Negara RI Nomor 18 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495. Sekretaris Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562. Sekretaris Negara. Jakarta.

Toelatingsbesluit 1916 (*Staatsblad* 1916–47) jo. *Toelatingsbesluit* 1949 (*Staatsblad* 1949–330).

Toelatingsordonantie 1949 (*Staatsblad* 1949–331).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara RI Nomor 68 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5409. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Lembaran Negara RI Nomor 12 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 42/Darurat/1950 tentang Bea Imigrasi. Lembaran Negara RI Nomor 42 Tahun 1950. Tambahan Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 1950. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara RI Nomor 52 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8/Drt./1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi. Lembaran Negara RI Nomor 28 Tahun 1955, Tambahan Lembaran Negara Nomor 807. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 9/Drt./1953 tentang Pengawasan Orang Asing. Lembaran Negara RI Nomor 64 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 9/Drt./1955 tentang Kependudukan. Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 1955, Tambahan Lembaran Negara Nomor 821. Sekretaris Negara. Jakarta.

